

Bab I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan segala hal yang didapatkan dari sumber daya alam (SDA) yang diperuntukkan untuk dikonsumsi maupun diminum oleh manusia, yang diolah dan tidak diolah. Di dalamnya juga termasuk tambahan bahan makanan lain yang termasuk pada proses pembuatan makanan atau minuman. Penjelasan tersebut adalah pengertian pangan menurut *Food and Agricultural Organization* (FAO) yang juga tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2012.

Isu kelaparan dan kerawanan pangan terus terjadi sampai saat ini dan masih terus bertambah di beberapa wilayah di dunia dan merupakan sebuah masalah struktural dan masif yang berkaitan dengan kemiskinan. Hal tersebut semakin diperparah dengan fakta bahwa di negara berkembang mayoritas masyarakat miskin tinggal di pedesaan. Beberapa alasan yang menyebabkan kebutuhan pangan sulit dipenuhi diantaranya yaitu, sulitnya akses terhadap bahan pangan, ketidakmampuan pendapatan rumah tangga maupun nasional untuk membeli pangan, adanya ketidakstabilan antara permintaan dan penawaran atas pangan, bencana alam, dan ulah manusia. Selain itu, konflik, terorisme, korupsi, dan degradasi lingkungan juga memiliki peran besar dalam masalah kerawanan pangan.

Menurut *United States Agency for International Development* (USAID) (1995), ketahanan pangan dapat diartikan melalui tiga hal yaitu, ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan dapat tercapai di suatu negara jika jumlah pangan secara konsisten tersedia untuk semua masyarakat. Pangan untuk masyarakat bisa diperoleh melalui beberapa cara, yaitu produksi dalam negeri, pendapatan dalam negeri lainnya, impor, dan bantuan pangan. Akses terhadap pangan dapat tercapai jika semua rumah tangga dan individu memiliki akses yang setara dalam memenuhi kebutuhan gizi mereka. Selanjutnya, pemanfaatan pangan berkaitan dengan kegunaan pangan untuk biologi secara tepat, pangan yang memberikan energi yang cukup dan nutrisi yang penting bagi tubuh, air minum, dan sanitasi yang memadai (Rivera & Qamar, 2003).

Ketahanan pangan hadir ketika semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama baik secara finansial maupun fisik untuk mendapatkan makanan yang mereka yakini cukup, dan aman untuk hidup sehat. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan adalah sebuah kondisi di mana setiap rumah tangga tidak memiliki risiko untuk kehilangan akses terhadap pangan untuk keluarganya, baik secara fisik maupun ekonomi demi kelangsungan hidupnya.

Berdasarkan data dari *Global Food Security Index*, jika dilihat dalam lingkup regional, indeks ketahanan pangan di wilayah Asia Tenggara tahun 2021, Indonesia (59,2%) berada pada urutan ke-6 setelah Singapura (77,4%), Malaysia (70,1%), Thailand (64,5%), Vietnam (61,1%), dan Filipina (60%). Data tersebut menunjukkan ketahanan pangan Indonesia di kawasan Asia Tenggara masih lemah. Bahkan, mengalami penurunan poin ketahanan pangan pada tahun 2021 sebesar 3.58% jika dibandingkan dengan tahun 2020 (61,4%)

Indonesia masih memiliki beban yang cukup berat untuk membangun ketahanan pangan nasional yang stabil. Indonesia juga merupakan salah satu dari 26 negara *middle income* dengan pengeluaran untuk riset dan pengembangan bidang agrikultur yang rendah. Indonesia hanya membelanjakan 0,18% dari total PDB negara untuk riset dan pengembangan sektor agrikultur, padahal dengan adanya riset dan pengembangan di sektor agrikultur akan membantu pemerintah dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Indonesia merupakan negara berkembang yang di sebagian wilayahnya masih terjadi kemiskinan dan kerawanan pangan.

Mencapai ketahanan pangan nasional merupakan salah satu hal yang penting di Indonesia, mengingat besarnya jumlah penduduk. Upaya Indonesia dalam membangun manusia berkualitas berhubungan dengan ketahanan pangan berbasis faktor jumlah dan keragaman pangan dan gizi masyarakat. Salah satu aspek penting dalam mendorong tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia adalah meratanya ketahanan pangan. Perekonomian merupakan aspek utama yang menjadi faktor pembentuk ketahanan pangan nasional. Setiap tahunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu mengalami peningkatan, hal tersebut menyebabkan angka kemiskinan juga mengalami penurunan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2021 memperlihatkan jumlah penduduk dengan kategori miskin

menurun dari 27,55 juta atau sebesar 10,19% menjadi 26,50 juta orang atau sekitar 9,71% pada September 2020.

BPS menjelaskan bahwa pangan memberi kontribusi terbesar bagi kemiskinan, sehingga Indonesia harus mampu untuk stabilisasi harga pangan. Secara umum, Indonesia sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama lima tahun terakhir. Namun, sampai saat ini gizi masyarakat Indonesia masih berada di bawah angka rekomendasi. Menurut Chaireni et al., 2020, ada beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam membentuk ketahanan pangan nasional, diantaranya adalah pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, menurunnya luas lahan pertanian, masih banyak bahan pangan yang bergantung pada impor, dan rendahnya transfer teknologi.

Sebagai negara berkembang, Indonesia kemungkinan akan menghadapi kesulitan dalam mencapai dan mempertahankan ketahanan pangan nasional pada periode 2015-2025. Bahkan, data BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa berbagai provinsi di Indonesia Timur memiliki tingkat konsumsi kalori yang rendah jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian Barat. Konsumsi kalori di Provinsi Maluku Utara sebesar 1,773,40 kkal berada dua tingkat di atas Provinsi Papua yang berada pada posisi terendah. Jumlah angka kemiskinan di Maluku Utara mengalami kenaikan pada periode September 2020 sebesar 87,52 ribu orang (6,97%) jika dibandingkan dengan Maret 2020 86,37 ribu orang (6,78%). Selain itu, pada 2020 Provinsi Maluku Utara memiliki angka indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 68,49%, menunjukkan penurunan 0,21% jika dibandingkan tahun 2019. Sedangkan, jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2020 sebesar 5,15%.

Jika data tersebut dibandingkan dengan di Provinsi Lampung yang memiliki tingkat kemiskinan pada tahun 2020 mencapai 1,05 juta orang (12,34%), IPM mencapai 69,69%, jumlah TPT 4,67%, dan konsumsi kalori masyarakat di Provinsi Lampung mencapai 2,024,63 kkal (Badan Pusat Statistik, n.d.). Menunjukkan bahwa walaupun dengan angka kemiskinan yang tinggi, masyarakat di Provinsi Lampung lebih mampu untuk mengkonsumsi makanan dengan kalori lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di Provinsi Maluku Utara.

Data tersebut menunjukkan bahwa di Maluku Utara masih memiliki beberapa permasalahan seperti cukup tingginya pengangguran dan rendahnya konsumsi kalori masyarakat. Selain itu, konflik yang terjadi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara pada tahun 1999-2003 memberi dampak yang besar bagi mata pencaharian dan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Bahkan, perekonomian masyarakat mengalami penurunan sebesar 30%. Pada tahun 2009, sebesar 10% penduduk di Provinsi Maluku Utara termasuk dalam kelompok yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai bentuk sumber daya seperti manusia, fisik, keuangan, alam, sosial, dan modal menyebabkan tingginya angka pengangguran dan defisit sereal yang dialami oleh masyarakat pada saat itu.

Pada perkembangannya, produktivitas agrikultur di Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Beberapa penyebab rendahnya produktivitas tersebut diantaranya : 1. Sistem manajemen dan pemasaran yang tidak memadai 2. Penggunaan sistem ladang berpindah yang masih dilakukan di beberapa daerah 3. Pengetahuan yang terbatas mengenai praktik pertanian yang baik dan lebih modern 4. Rendahnya jangkauan penelitian dan penyuluhan yang efektif 5. Infrastruktur pedesaan yang buruk 6. Rendahnya produksi pangan dan sumber keuangan yang kurang tepat.

Faktor-faktor tersebut menyebabkan hasil produksi masyarakat berkualitas buruk dengan nilai pasar yang rendah, meskipun sebenarnya para petani membudidayakan tanaman yang berpotensi memiliki harga jual yang tinggi, seperti cengkeh, pala, biji coklat, dsb. tanpa penambahan nilai melalui proses pengolahan dan pemasaran. Sedangkan, untuk tanaman pangan hanya diproduksi untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja. Faktor lainnya seperti program pemerintah yang saling tumpang tindih, tidak terkoordinasi dan hanya dilakukan dalam jangka pendek dapat menyebabkan kebingungan, sikap apatis, konflik, ketergantungan, dan rendahnya sistem pertanian yang berkelanjutan (International Fund for Agricultural Development, 2012).

Permasalahan lain yang dihadapi di Provinsi Maluku Utara adalah pasar dan sistem informasi terkait pasar yang masih terbatas dan program pemerintah yang saling tumpang tindih dan berjangka pendek menyebabkan kurangnya keberlanjutan dalam peningkatan sektor pertanian dan perekonomian masyarakat di

Provinsi Maluku Utara. Hal tersebut menyebabkan para petani mengalami kesulitan dalam pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian. Sehingga, menyebabkan masyarakat di Maluku Utara masih kesulitan dalam membentuk ketahanan pangan dalam lingkup keluarga.

Isu utama pada setiap kebijakan pangan yang dikeluarkan oleh Indonesia selalu berorientasi pada memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi. Dalam mewujudkan hal tersebut, ada dua hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu pengentasan kemiskinan dan menstabilkan ketersediaan dan harga pangan. Kemiskinan berkaitan dengan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan mereka termasuk kebutuhan pangan yang bisa mendorong kerawanan pangan. Kerawanan pangan bisa timbul pada berbagai tingkatan, mulai dari individu, rumah tangga, nasional, dan bahkan regional.

Indonesia yang merupakan negara berkembang yang sebagian wilayahnya terjadi kemiskinan dan kerawanan pangan. Kerawanan pangan tidak dapat dipisahkan dari kemiskinan, kehidupan, dan sumber daya di masyarakat. Pemerintah harus bisa memberikan kemudahan akses bagi kelompok masyarakat miskin untuk memperoleh pangan. Isu ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan Indonesia sejak dibentuknya *food insecurity map* pada tahun 2005 yang merupakan kerjasama antara dewan ketahanan pangan dan *World Food Programme* (WFP).

Di Provinsi Maluku Utara, pemerintah juga telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan ketahanan pangan. Pada tahun 2018, Provinsi Maluku Utara memperoleh bantuan benih padi sebesar 7.500 ha. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan nasional yang salah satunya dengan memperluas produksi padi. Di Provinsi Maluku Utara, padi sangat sedikit diproduksi karena topografi wilayahnya yang perbukitan menyebabkan petani sulit untuk menanam padi. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya untuk membentuk keberagaman pangan untuk mencapai ketahanan pangan lokal. Pemerintah daerah Maluku Utara juga membentuk “Gerakan Maluku Utara Menanam” yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan lokal saat terjadi pandemi Covid-19. Program ini berfokus pada penanaman berbagai macam umbi-umbian dan sayuran. Selain itu, pada tahun 2022 melalui kementerian pertanian pemerintah Indonesia mendorong penanaman

berbagai macam komoditi pangan seperti singkong, jagung, dan kedelai untuk mengatasi krisis pangan global dan mendorong ketahanan pangan di Provinsi Maluku Utara. Bahkan, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran untuk mendorong ketahanan lokal di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 81,06 miliar.

IFAD (*International Fund for Agricultural Development*) merupakan badan khusus PBB berbasis di Roma. IFAD adalah pusat pangan dan pertanian PBB yang terbentuk setelah *World Food Conference* pada 1974. Dalam menangani kemiskinan, IFAD bukan hanya berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman, tetapi juga menjadi advokat bagi petani kecil, nelayan, pengrajin, peternak, pekerja yang tidak memiliki tanah dan masyarakat adat yang bertempat tinggal di pedesaan. Dalam mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan, IFAD juga bekerjasama dengan berbagai aktor lain, seperti pemerintah, pendonor, organisasi non pemerintah, masyarakat lokal dan mitra lain.

Sebagai salah satu bentuk intervensi IFAD dalam menangani isu ketahanan pangan di Indonesia dan hasil dari *country strategic opportunities programme* (COSOP) 2009-2013 (periode kedua) sebagai sebuah kerangka kerja adalah dibentuknya *Smallholder Livelihood Development Project (SOLID) in Eastern Indonesia* pada tahun 2011-2019. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dan kerawanan pangan di Indonesia Timur. Penelitian ini berfokus dengan studi kasus di Provinsi Maluku Utara. Proyek ini diharapkan dapat berkontribusi positif pada masyarakat pedesaan melalui peningkatan kehidupan masyarakat baik pendapatan, ketahanan pangan, dan mengurangi kemiskinan di Provinsi Maluku Utara.

Dalam menjelaskan isu ketahanan pangan, penulis menjelaskan mengenai penelitian terdahulu mengenai ketahanan pangan dan kemiskinan di Indonesia untuk memperluas topik penelitian penulis.

Literatur pertama ditulis oleh Hamid El Bilali, dkk. dengan judul "*Climate Change and Food Security*". Jurnal ini membahas bahwa perubahan iklim bisa berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Ketersediaan bahan pangan dipengaruhi karena perubahan iklim menyebabkan adanya kenaikan suhu, kekeringan, banjir, dan bencana alam lainnya. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil panen

dan produktivitas perikanan dan peternakan. Lalu, perubahan iklim bisa mempengaruhi akses pangan karena hasil produksi pangan bisa menjadi rusak dan tidak memiliki nilai jual lagi. Selain itu, kegiatan impor-ekspor barang bisa dikurangi atau dilarang. Sehingga, menyebabkan adanya perubahan harga pangan yang berdampak pada kehidupan masyarakat terutama di desa.

Perubahan iklim juga berpengaruh pada sistem pangan di wilayah tersebut. Permasalahan seperti pasokan pangan baik dari pertanian, perikanan, maupun peternakan, kemampuan negara untuk mengimpor pangan, sistem distribusi pangan, dan kemampuan rumah tangga untuk membeli dan memanfaatkan pangan berpengaruh besar pada stabilitas pangan. Lalu, pemanfaatan pangan juga sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim karena berdampak pada gizi penduduk terutama masyarakat miskin dan rentan. Rendahnya kualitas air dan pangan bisa menyebabkan penyakit, terutama bagi anak-anak (El Bilali et al., 2020).

Literatur kedua ditulis oleh Pawlak dan Kolodziejczak berjudul “*The Role of Agriculture in Ensuring Food Security in Developing Countries: Considerations in the Context of the Problem of Sustainable Food Production*”, dalam literatur ini dijelaskan bahwa bagi negara berkembang pertanian merupakan salah satu sektor penting untuk mencapai ketahanan pangan. Namun, terdapat beberapa permasalahan seperti tingginya jumlah pertumbuhan penduduk, isu lingkungan seperti banjir dan kekeringan, teknologi yang tidak memadai, dan rendahnya pengetahuan masyarakat menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mengakses dan memperoleh pangan (Pawlak & Kolodziejczak, 2020).

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan ketersediaan pangan dan mencapai ketahanan pangan. Namun, di negara berkembang permasalahan terkait teknologi dan pengetahuan menjadi permasalahan utama dalam mencapai ketahanan pangan. Sehingga, dibutuhkan adanya investasi pada sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam memastikan terpenuhinya bahan pangan nasional, mengurangi kemiskinan, dan sumber lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat. Salah satu permasalahan negara berkembang seperti Indonesia dalam pertanian adalah teknologi yang tidak memadai dan rendahnya pengetahuan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan adanya investasi dan penyuluhan bagi

masyarakat Indonesia untuk perkembangan produksi pertanian. Dengan adanya efisiensi teknologi di Indonesia dapat mendorong stabilitas harga untuk mendukung ketahanan pangan. Permasalahan ini lalu diangkat oleh IFAD dalam membantu penduduk Maluku Utara untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Literatur ketiga ditulis oleh Hadiprayitno, dengan judul *“Food Security and Human Rights in Indonesia”*, yang menjelaskan bahwa hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu bagian penting dari terpenuhinya hak asasi manusia (HAM) yang termuat pada Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Hak tersebut kemudian dicantumkan dalam Pasal 11 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), menjelaskan bahwa semua negara harus mengakui setiap masyarakat memiliki hak untuk memperoleh standar hidup yang layak seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal bagi dirinya dan keluarganya. Di Indonesia, hak atas pangan tercantum dalam Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 Pasal 9, menjelaskan bahwa semua orang memiliki hak hidup, mempertahankan hidupnya, dan meningkatkan taraf hidupnya. Pasal tersebut secara implisit menjelaskan bahwa hak atas pangan juga dijamin di Indonesia (Hadiprayitno, 2012).

Pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat dalam memastikan kelangsungan hidupnya. Ketika kebutuhan pangan masyarakat tidak terpenuhi, berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik dapat muncul. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia harus bisa memastikan bahwa seluruh masyarakatnya memiliki kemampuan untuk memperoleh pangan yang sehat dan bergizi untuk pemenuhan hak asasi manusia. Indonesia harus mampu memenuhi hak masyarakat dan mendukung adanya upaya progresif untuk mencapai dan memenuhi hak atas pangan. Pemerintah perlu memastikan tidak adanya tindakan diskriminasi dan upaya mengambil langkah konkrit dalam merealisasikan hak-hak ini.

Selanjutnya merupakan literatur keempat yang ditulis oleh Arif Wahyu Widada dkk. dengan judul *“Determinant Factors Of Food Security In Indonesia”*, data penulis menunjukkan bahwa ada penurunan dalam kualitas pangan di beberapa provinsi di Indonesia. Pada rata-rata tahun 2011-2014 lebih dari setengah dari provinsi di Indonesia berada dalam kondisi kerentanan pangan. 3 provinsi utama yang termasuk dalam wilayah kekurangan pangan adalah Kalimantan Timur,

Papua, dan Maluku Utara. Hal ini terjadi karena mayoritas masyarakat di wilayah tersebut mengkonsumsi pangan yang rendah kalori.

Penelitian ini menunjukkan bahwa wilayah dengan penduduk lebih padat, lebih mungkin untuk memiliki ketahanan pangan yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Provinsi yang padat penduduk seperti Sumatera dan Jawa merupakan daerah dengan ketahanan pangan yang lebih baik dibandingkan dengan provinsi pulau berpenduduk sedikit seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Utara, dan Papua. Wilayah yang padat penduduk merupakan pusat perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi lebih baik jika dibandingkan dengan masyarakat yang bertempat tinggal di pulau yang tidak padat penduduk. Masyarakat di wilayah padat penduduk memiliki daya beli yang lebih baik, sehingga mereka memiliki kemampuan dalam mengakses berbagai sumber makanan dengan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, dibandingkan dengan masyarakat di wilayah Timur Indonesia (Wahyu Widada & Handoyo Mulyo, 2017)

Dalam literatur kelima yang ditulis oleh Jufri Jacob dan Zulkifly Waibot berjudul “Mengukur *Output Gap* Ekonomi Maluku Utara (Pendekatan Hodrick-Prescott Filter)” menjelaskan bahwa, berdasarkan metode Hodrick Prescott filter, fluktuasi perekonomian di Provinsi Maluku Utara didominasi oleh resesi. Secara dominan resesi terjadi pada tahun 2014-2017, bahkan pada awal tahun 2020 perekonomian Maluku Utara telah mengalami resesi. Resesi merupakan penurunan aktivitas ekonomi yang secara signifikan meluas pada banyak sektor perekonomian masyarakat, seperti produksi, pendapatan riil, kesempatan bekerja penuh waktu, dsb. Penurunan perekonomian ini bisa terjadi dalam jangka waktu yang pendek dalam beberapa bulan. Ini menunjukkan bahwa adanya masyarakat Maluku Utara masih tidak mampu memaksimalkan perekonomian daerahnya yang mengakibatkan adanya kesenjangan *output* antara produk domestik regional bruto (PDRB) potensial dengan PDRB aktual. Kesenjangan ini bisa mengakibatkan masyarakat sulit untuk membentuk ketahanan pangan keluarga (Jacob & Waibot, 2022).

Selanjutnya, literatur keenam dalam *chapter* buku berjudul “*Agriculture, Food, and Nutritional Security: An Overview*” yang ditulis oleh Rukhsana dan Asrafal Alam, menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas pertanian berdampak

positif bagi ketahanan pangan masyarakat karena harga pangan menjadi lebih murah dan perekonomian meningkat. Dengan adanya peningkatan produktivitas dan kemajuan teknologi pertanian mendorong pemanfaatan sumber daya yang lebih maksimal dan efisien dalam membentuk ketahanan pangan (Rukhsana & Alam, 2021).

Rendahnya produktivitas pertanian juga menjadi salah satu isu yang harus diperhatikan di Maluku Utara karena pertanian memainkan peran penting dalam perekonomian di Indonesia Timur. Beberapa permasalahan produktivitas pertanian yang dihadapi oleh petani di Indonesia Timur khususnya di Maluku Utara adalah sistem manajemen dan pemasaran produk yang tidak memadai, adanya sistem ladang berpindah, kurangnya pengetahuan masyarakat, dan infrastruktur yang buruk. Hal tersebut menyebabkan produk pertanian bernilai jual rendah, padahal produk pertanian berpotensi memiliki nilai jual yang tinggi seperti, kakao, pala, cengkeh, dll. Oleh sebab itu, upaya untuk memaksimalkan sistem pertanian lokal sangat dibutuhkan untuk memastikan ketersediaan pangan bagi daerah.

Literatur ketujuh berjudul *“Impact of International Fund for Agricultural Development (IFAD)/Community Based Agricultural and Rural Development Programme (CBARDP) On Poverty Reduction Among Rural Women in Kebbi State, Nigeria”* yang ditulis oleh Manga, dkk. Penelitian ini menjelaskan bahwa di Nigeria, kemiskinan menjadi sebuah hal yang endemik di beberapa wilayah di Nigeria bagian Utara. Literatur ini memastikan bahwa intervensi yang dilaksanakan oleh IFAD di Nigeria telah mendorong adanya peningkatan kesejahteraan bagi perempuan pedesaan. Hal ini karena program tersebut memberi dampak positif bagi perempuan di wilayah tersebut, diantaranya peningkatan pendapatan, nilai aset, kesejahteraan, dan mata pencaharian mereka (Manga et al., 2015).

Selanjutnya, literatur kedelapan berjudul *“Impact of IFAD - Community Based Agriculture and Rural Development Programme on the Farm Incomes of the Marginalized and Vulnerable Participants and Non-Participants in Katsina State, Nigeria”* yang ditulis oleh Gambo et al., Literatur ini menjelaskan bahwa para petani skala kecil di daerah pedesaan Nigeria tidak memiliki modal yang cukup dalam meningkatkan pertanian mereka untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Bahkan, kemiskinan di wilayah Nigeria dianggap telah “meluas dan

parah”. Sehingga, IFAD hadir dengan untuk mengatasi masalah kemiskinan di negara bagian Katsina, Nigeria. Program ini dilakukan dengan meningkatkan mata pencaharian dan kondisi kehidupan masyarakat pedesaan dengan pendekatan *Community Driven Development* (CDD) yang dianggap tepat untuk pengentasan kemiskinan di Nigeria.

Program IFAD-CBARDP memiliki dampak positif pada peningkatan pendapatan petani yang menjadi bagian dalam program yang dilaksanakan oleh IFAD. Bahkan, para petani yang bukan merupakan partisipan pada program IFAD juga mengalami peningkatan pendapatan. Oleh sebab itu, program IFAD-CBARDP telah berhasil mencapai tujuan mereka dalam meningkatkan pendapatan petani lokal di negara bagian Katsina, Nigeria. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebuah organisasi internasional seperti IFAD mampu untuk meningkatkan pendapatan petani, sehingga dapat mengurangi kemiskinan di negara bagian Katsina, Nigeria (Gambo et al., 2017).

Lalu, pada literatur yang kesembilan berjudul *“The Impact of IFAD’s Involvement as an Inter-Governmental Organisation in the Livelihood of Moroccan Family-Farms”* yang ditulis oleh Nicimbikije dan Dewi menunjukkan bahwa *intergovernmental organization* seperti IFAD memiliki peran penting dalam membantu negara menjalankan fungsinya. Contohnya adalah kehadiran IFAD di Maroko sebagai sebuah agen perubahan. Salah satu proyek yang dilakukan oleh IFAD di Maroko adalah memberi kemudahan akses informasi dan penyuluhan pertanian bagi masyarakat pedesaan yang bertempat tinggal di pegunungan. Diharapkan bahwa integrasi pasar ini akan membantu petani-petani kecil dalam mengembangkan bisnis pertanian mereka. Dengan dana yang diperoleh dari IFAD, anggaran pertanian Maroko mengalami penambahan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih belum mampu menangani isu-isu sosial seperti kesenjangan antara penduduk pedesaan dan perkotaan. Oleh sebab itu, IFAD sebagai sebuah organisasi internasional dapat mengisi kesenjangan yang ada dan membantu negara dalam mengatasi permasalahan sosial (Nicimbikije & Dewi, 2021).

Literatur selanjutnya yang kesepuluh berjudul *“IFAD Projects: Results and Impact on Poverty Reduction in Rural China”* yang ditulis oleh Shuai, dkk. menjelaskan bahwa IFAD telah banyak membantu pembiayaan di China untuk

pengentasan kemiskinan dengan memberi berbagai macam proyek mikro-kredit. Kehadiran IFAD di China juga efektif dalam peningkatan kehidupan para petani dalam produksi pertanian, infrastruktur, pekerjaan, teknologi, ketahanan pangan, sumber daya manusia, dan pendapatan. Program IFAD juga telah membantu mempromosikan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan ekologi.

Selain itu, kehadiran IFAD juga berdampak positif bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Hal ini karena program IFAD memberikan pinjaman dana dan peningkatan kemampuan para perempuan. IFAD juga berperan penting dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat desa dan organisasi yang berbasis komunitas. Bahkan, IFAD mampu memfasilitasi perubahan kebijakan pedesaan di China (Shuai et al., 2011).

Beberapa literatur terdahulu diatas, telah menjelaskan bahwa peran negara sangat penting dalam mengatasi isu perubahan iklim dan mendorong investasi untuk membentuk ketahanan pangan (El Bilali et al., 2020; Hadiprayitno, 2012; Pawlak & Kołodziejczak, 2020). Peningkatan produktivitas pertanian merupakan upaya yang harus dilakukan di Maluku Utara yang masih sulit dalam mencapai ketahanan pangan lokal karena resesi yang terus terjadi (Jacob & Waibot, 2022; Rukhsana & Alam, 2021; Wahyu Widada & Handoyo Mulyo, 2017).

Literatur yang membahas terkait dampak IFAD pada suatu wilayah masih cukup sulit untuk ditemukan. Penulis menemukan tiga literatur terkait dampak IFAD di Afrika, yang ditulis oleh Gambo et al., 2017; Manga et al., 2015; Nicimbikije & Dewi, 2021. Ketiga penelitian tersebut menyebutkan berbagai macam upaya dan keberhasilan IFAD dalam mengurangi kemiskinan di Afrika. Pada cakupan Asia, dampak dari IFAD hanya ditemukan pada karya yang ditulis oleh dan Shuai, et al (2011), yang menjelaskan bahwa IFAD mampu mengurangi kemiskinan di China.

Penelitian terkait dampak positif IFAD di Asia dilakukan pada rentang waktu yang sudah cukup lama pada tahun 2011. Selain itu, penelitian terkait dampak dan peran IFAD untuk peningkatan ketahanan pangan di wilayah pedesaan masih belum pernah dilakukan. Mayoritas literatur terkait peran IFAD di suatu negara hanya berfokus pada upaya penurunan kemiskinan terutama di wilayah Afrika. Indonesia juga masih belum terlalu mementingkan isu ketahanan pangan, terutama di Provinsi

Maluku Utara, sehingga IFAD berfungsi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait peran dan dampak IFAD pada peningkatan ketahanan pangan di suatu negara khususnya di Asia.

1.2 Rumusan Masalah

Provinsi Maluku Utara merupakan daerah yang kaya SDA di kawasan timur Indonesia. Tetapi, pemanfaatan SDA tersebut masih sangat minim karena rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM). Banyak wilayah di Maluku Utara yang termasuk dalam wilayah defisit pangan. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi iklim, lahan, dan bencana alam yang terjadi secara berulang seperti banjir, kekeringan dsb. Rendahnya infrastruktur juga menjadi salah satu penyebab sulitnya mencapai ketahanan yang merata di Maluku Utara. Infrastruktur yang tidak memadai menyebabkan masyarakat sulit melakukan mobilitas untuk perpindahan pangan ke daerah lain.

Permasalahan lain yang dihadapi pada sektor pertanian di Maluku Utara adalah masih rendahnya keberagaman pangan. Padahal, diversifikasi ketahanan pangan dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi daerah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Rendahnya kemakmuran perekonomian masyarakat dan tingginya jumlah masyarakat berada bawah garis kemiskinan menyebabkan Provinsi Maluku Utara menjadi fokus program IFAD.

Penelitian ini berfokus pada program IFAD terhadap ketahanan pangan di Indonesia dengan studi kasus di Provinsi Maluku Utara. Program *Smallholder Livelihood Development Project (SOLID) In Eastern Indonesia* merupakan program IFAD yang dilaksanakan pada periode 2011-2019. Sehingga, penulis memilih untuk menjelaskan mengenai **“Bagaimana peran *International Fund For Agricultural Development (IFAD)* dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Provinsi Maluku Utara Melalui Program *Smallholder Livelihood Development Project (SOLID) In Eastern Indonesia (SOLID) 2011-2019?*”**

1.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Praktis

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan praktis, yaitu:

1. Menggambarkan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan IFAD di Provinsi Maluku Utara.
2. Menjelaskan upaya yang dilakukan oleh IFAD di Indonesia dalam meningkatkan perekonomian dan ketahanan pangan masyarakat desa di Provinsi Maluku Utara.
3. Mengetahui dampak kerjasama antara Indonesia dan IFAD di Provinsi Maluku Utara.

b. Tujuan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur terkait peran IFAD di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya wawasan mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan IFAD, terutama pada peningkatan ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat desa di Provinsi Maluku Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Diharapkan kajian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan pada hubungan internasional tentang peran aktor non-negara yaitu sebuah organisasi internasional untuk peningkatan ketahanan pangan khususnya pada masyarakat pedesaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam peningkatan ketahanan pangan nasional dan daerah dan perekonomian terutama bagi masyarakat pedesaan.

b. Manfaat Praktis

Kajian ini dimaksudkan sebagai salah satu referensi kajian ilmiah untuk sivitas akademik, *decision maker*, dan pemerhati isu ketahanan pangan dan perekonomian dalam upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat pedesaan. Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan mengenai upaya IFAD dalam meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia.

1.5 Sistematika Penelitian

Bab I - Pendahuluan

Penulis menjelaskan latar belakang penelitian yang menjabarkan konsep ketahanan pangan, kondisi ketahanan pangan Indonesia dalam lingkup nasional dan regional, keterkaitan antara kemiskinan dengan kerawanan pangan, kondisi kemiskinan dan ketahanan pangan di Provinsi Maluku Utara, hingga hadirnya IFAD di Indonesia. Pada bagian ini, penulis juga mencantumkan beberapa hal lainnya, seperti rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penelitian.

Bab II - Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini, penulis memberikan konsep dan teori mengenai hal yang diteliti dan kerangka penulisan penelitian ini. Penulis menjelaskan dua konsep dan teori yang berhubungan dengan pembahasan pada penelitian ini berdasarkan pada berbagai data yang sudah diperoleh dari buku, artikel, dan sumber lain yang substansial bagi penelitian.

Bab III - Metode Penelitian

Penulis menjabarkan metode yang digunakan pada saat melakukan penelitian. Bab ini dibagi menjadi beberapa bagian yang membahas mengenai, jenis penelitian, sumber data terkait, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV - Ketahanan Pangan di Indonesia dan Provinsi Maluku Utara

Bab keempat ini menjelaskan mengenai perkembangan isu ketahanan pangan di Indonesia dan Provinsi Maluku Utara. Pada bagian ini penulis secara khusus menjabarkan secara umum gambaran mengenai perkembangan isu ketahanan pangan di Indonesia dan di Provinsi Maluku Utara.

Bab V - Peran IFAD dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Provinsi Maluku Utara Melalui Program *Smallholder Livelihood Development Project (SOLID) In Eastern Indonesia 2011-2019*

Pada bagian ini penulis menjabarkan terkait peran yang dilakukan oleh IFAD untuk meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Maluku Utara. Penulis

mengelaborasi temuan tersebut dengan konsep dan teori penelitian untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab VI - Kesimpulan

Pada bagian yang terakhir, penulis menyelesaikan penelitian ini dengan kesimpulan yang didasarkan pada temuan informasi pada bab satu sampai bab lima. Penulis juga memberikan saran terkait dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.